



**MIMBAR ALAT KELENGKAPAN DEWAN**  
 **DPRD KOTA YOGYAKARTA**

PIMPINAN DPRD KOTA YOGYAKARTA

## Optimalisasi Pengelolaan Sampah Butuh Program Riil

**YOGYA (KR)** - Upaya pengurangan volume sampah yang dibuang ke TPA Piyungan sudah digulirkan Pemkot Yogyakarta sejak awal Januari 2023. Program tersebut diawali dengan gerakan bebas sampah anorganik yang menyasar pemilahan di tingkat rumah tangga. Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta mendukung program itu dan mendorong adanya program riil agar pengelolaan sampah memberikan hasil yang optimal.

Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta merupakan salah satu alat kelengkapan dewan yang merepresentasikan kelembagaan dewan. Di Kota Yogyakarta, alat kelengkapan tersebut diemban oleh tiga orang yang juga ex officio pimpinan, yakni H Danang Rudyatmoko dari Fraksi PDI Perjuangan selaku Ketua, HM Fursan SE, dari Fraksi PAN menjabat Wakil Ketua I, dan Dhian Novitasari SPd dari Fraksi Partai Gerindra sebagai Wakil Ketua II.

Danang mengaku, sejak awal program pengelolaan sampah digulirkan jajarannya selalu memberikan dukungan kepada unsur eksekutif. "Bahkan tidak sekadar mendukung, kami justru mendorong agar program itu berjalan dengan baik. Bentuk dorongan itu kami wujudkan dalam hal pengawasan, masukan hingga persetujuan anggaran yang dibutuhkan. Kami pun akan selalu bersama pemerintah dan masyarakat kaitannya dengan persoalan sampah ini," ujarnya.

Diakukannya Kota Yogyakarta memang cukup bergantung dengan TPA Piyungan untuk pembuangan sampah akhir. Situasi pelik yang dialami TPA Piyungan harus segera dire-

spons oleh setiap daerah yang mememanfaatkannya. Khususnya bagi Kota Yogyakarta yang mendominasi pemanfaatan TPA Piyungan dibanding Kabupaten Sleman dan Bantul. Oleh karena itu upaya pengelolaan sampah secara mandiri berbasis masyarakat menjadi salah satu solusi. Kendati demikian, hal tersebut, tetap dibutuhkan program yang riil.

Di lain pihak, Danang mengakui pihaknya menaruh perhatian terkait volume sampah yang mulai berkurang. Pemkot Yogyakarta sejauh ini kerap menggembor-gemborkan terdapat penurunan volume sampah yang dibuang ke TPA Piyungan hingga 10 persen per hari akibat gerakan bebas sampah anorganik. "Dengan sistem pengolahan terpelih itu diinformasikan volumenya berkurang 10 persen. Nah ini perlu ditelusuri, berkurangnya itu karena tertunda pemuangannya, berhasil terkelola atau justru ada warga yang membuang sampah di jalan-jalan maupun sungai. Jadi 10 persennya itu kemana harus dipastikan," paparnya.

Jika pengurangan sebanyak 10 persen itu benar-benar terkelola, maka tidak menjadi persoalan. Sebaliknya, ketika sampah yang terpelih itu hanya disisihkan dan tidak disetorkan ke depo maka perlu ada tindak lanjut. Begitu pula ketika justru ada temuan sampah di berbagai titik jalan maupun di beberapa sungai maka harus ada evaluasi. Pasalnya, sejak gerakan bebas sampah anorganik digulirkan, depo sampah di Kota Yogyakarta sudah tidak menerima jenis sampah tersebut. Petugas dari unsur Immas maupun Sat Pol PP juga turut dilibatkan melakukan penjagaan di tiap depo secara bergil-



**H Danang Rudyatmoko**  
KR-Istimewa



**HM Fursan SE**  
KR-Istimewa



**Dhian Novitasari SPd**  
KR-Istimewa

ran. Padahal sebelumnya ada sebagian warga yang tidak tinggal di Kota Yogyakarta namun turut membuang sampah rumah tangganya ke depo di Kota Yogyakarta dengan dibungkus kantong plastik. Terutama warga di daerah lain namun sehari-hari aktivitasnya di Kota Yogyakarta.

Dicontohkannya timbunan sampah di salah satu ruas jalan di Jalan Solo. Di sana tidak ter-

dapat tempat khusus untuk pembuangan sampah namun setiap hari selalu terdapat tumpukan sampah. "Ketika di situ ada tumpukan sampah, maka orang juga akan ikut membuang di situ. Sampah yang dibuang ke sana pun belum tentu sudah terpelih. Belum lagi di TPS lain yang sifatnya terbuka, juga akan menjadi jujukan pembuangan sampah yang belum terpelih.

Akhirnya penggerak atau petugas pemungut sampah harus melakukan pemilahan dulu sebelum disetor ke depo," terangnya.

Oleh karena itu, pihaknya mendorong ada program riil yang digulirkan di masyarakat, khususnya berbasis rumah tangga. Hal ini karena muara dari pengelolaan sampah ialah penyelesaian di sektor hulu. Jika itu berhasil, maka pe-

ngurangan volume sampah ke TPA Piyungan tidak hanya 10 persen, bahkan bisa mencapai 30 persen.

Dhian Novitasari, menambahkan gerakan bebas sampah anorganik menitikberatkan pada aktivitas rumah tangga. Rumah tangga selaku produsen sampah terbesar diminta memilah sampah anorganik untuk disetorkan ke bank sampah. Akan tetapi mereka belum dibekali sarana maupun pendampingan secara masif.

"Masyarakat diminta mandiri. Padahal action plan nya paling banyak di masyarakat. Program itu sudah bagus namun dibutuhkan goodwill yang lebih kuat lagi," katanya.

Senada diungkapkan HM Fursan yang berharap muncul kebersamaan dan sinergitas yang tidak terputus. Tanpa ada pendampingan yang berkelanjutan, dikhawatirkan program tersebut hanya berjalan di fase awal kemudian selanjutnya justru melemah. Oleh karena itu, pengelolaan sampah di sektor hulu harus betul-betul dituntaskan secara serius. Ketika masyarakat atau rumah tangga sudah melakukan pemilahan, secara teknis perlu dibekali sarana yang memudahkan seperti tempat khusus untuk jenis kertas, plastik, botol atau bahkan bahan berbahaya yang tidak boleh tercampur seperti baterai bekas atau lampu bekas. "Itu juga akan memudahkan dalam proses pengorganisasian di bank sampah," tandasnya.

Di samping itu, idealnya jika proses pemilahan sampah saja dilakukan setiap hari maka bank sampah pun operasionalnya juga bisa setiap hari. Ketika bank sampah hanya beroperasi seminggu sekali atau bahkan se-

bulan sekali, bisa kurang efektif. Dengan begitu, sampah anorganik yang bermalas ekonomis bisa langsung fereserap. Baik dikerjakan dengan pengumpul atau didaur ulang menjadi beragam karya.

Seiring dengan pengolahan sampah anorganik, maka sampah jenis organik juga perlu mulai digencarkan. Banyak pola yang bisa digunakan mulai biopori, pupuk kompos, maupun maggot.

"Dalam hal ini bantuan ke masyarakat juga harus diberikan. Misal untuk biopori, setidaknya ada dukungan peralatan dari pemerintah yang bisa dimanfaatkan. Intinya bagaimana masyarakat itu tidak berjalan sendiri namun mari kita bersama-sama." Proses edukasi harus terus kita gencarkan agar betul-betul menjadi budaya baru dalam pengelolaan sampah," terang Danang.

Ketika sampah anorganik sudah terkelola, sampah organik juga dikelola dan sisa makanan habis diserap maggot, maka sampah yang diproduksi masyarakat hanya tinggal residu. Penurunan volume sampah ke TPA Piyungan pun bisa mencapai 30 persen atau bahkan lebih.

Selain itu, budaya baru dalam pengelolaan sampah juga perlu ada percontohan. Setidaknya gedung pemerintah bisa memberikan contoh seperti menerapkan sistem papirless secara penuh serta menjadikan setiap pegawai sebagai agen perubahan di wilayahnya. "Menyiapkan lahan untuk mengantisipasi overloadnya di TPA Piyungan memang perlu. Tetapi yang paling mendasak ialah menyelesaikan persoalan di sektor hulu," pungkas Danang. **(Dhi)H**



**Petugas berjibaku membersihkan tumpukan sampah yang selalu terjadi di salah satu ruas Jalan Solo.**  
KR-Ardhi Wahdan

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat DPRD Kota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Lingkungan Hidup			

Yogyakarta, 28 September 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005